

PEMETAAN SOSIAL EKONOMI UMAT ISLAM SEBAGAI DASAR PERUMUSAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Riswan Rambe (UPU)¹, Jeroh Miko², Helfinaya Fattiyah Br. Mangunsong³, Intan Safitri⁴, Al Dira Hairani⁵, Tasya Maulidya Hutagalung⁶, Nadia Syahnanda⁷, Intan Khusnul Khotimah⁸

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Riswanrambe93@gmail.com

² Universitas Potensi Utama: jerohmiko70@yahoo.com

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: helfinayaafattiyah@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: ftiri1204@gmail.com

⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: aldirahairani@gmail.com

⁶ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: tasyamaulidya162@gmail.com

⁷ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: nadiasyahnanda@gmail.com

⁸ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: intankhusnulhotimah13@gmail.com

Abstract

Keywords:

Socio-economic mapping;
Community empowerment;
Development communication;
Muslim community; I-PKP Model;
Empowerment strategy

This study analyzes the significance of Muslim community socio-economic mapping as an empirical foundation for developing effective, sustainable, and transformative community empowerment strategies from a contemporary development communication perspective. Although Muslims constitute the majority population in Indonesia, they continue to experience significant socio-economic inequalities shaped by structural, historical, and institutional factors. This study employs a qualitative approach using a systematic literature review to synthesize evidence from academic publications, policy documents, and institutional reports. The findings indicate four main points. First, the socio-economic conditions of Indonesian Muslims require multidimensional mapping encompassing economic, educational, health, employment, social capital, and community aspiration aspects. Second, participatory socio-economic mapping not only generates accurate data but also functions as a development communication process that promotes critical community awareness. Third, integrating mapping results into empowerment planning produces more targeted, contextual, responsive, and sustainable programs. Fourth, the participatory development communication perspective strengthens the role of socio-economic mapping as a transformative empowerment instrument. This study proposes the Mapping-Communication-Empowerment Integration Model (I-PKP), consisting of four cyclical phases, as a conceptual framework to guide stakeholders in designing more responsive and impactful Muslim community empowerment programs.

Abstrak

Kata kunci:
Pemetaan sosial ekonomi;
Pemberdayaan masyarakat;
Komunikasi pembangunan;
Umat Islam;

Penelitian ini bertujuan menganalisis signifikansi pemetaan sosial-ekonomi masyarakat Muslim sebagai landasan empiris dalam penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif, berkelanjutan, dan transformatif dari perspektif komunikasi pembangunan kontemporer. Meskipun merupakan mayoritas penduduk Indonesia, masyarakat Muslim masih menghadapi berbagai ketimpangan sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor struktural, historis, dan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review melalui sintesis berbagai publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, dan

Author: Riswan Rambe (UPU), Helfinaya Fattiyah Br. Mangunsong, Intan Safitri, Al Dira Hairani, Tasya Maulidya Hutagalung, Nadia Syahmanda, Intan Khusnul Khotimah

Model I-PKP;
strategi
pemberdayaan

**Diajukan : Juni
2025**

**Diterima : Juli
2025**

**Diterbitkan : Juli
2025**

laporan kelembagaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, kondisi sosial-ekonomi masyarakat Muslim memerlukan pemetaan multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, modal sosial, dan aspirasi masyarakat. Kedua, pemetaan sosial-ekonomi partisipatif tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga menjadi proses komunikasi pembangunan yang mendorong tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat. Ketiga, integrasi hasil pemetaan ke dalam perencanaan pemberdayaan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, kontekstual, responsif, dan berkelanjutan. Keempat, perspektif komunikasi pembangunan partisipatif memperkuat fungsi pemetaan sebagai instrumen pemberdayaan yang transformatif. Penelitian ini menawarkan Model Integrasi Pemetaan-Komunikasi-Pemberdayaan (I-PKP) yang terdiri atas empat fase siklus sebagai kerangka konseptual bagi para pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat Muslim yang lebih responsif dan berdampak.

Corresponding Author:

Helfinaya Fattiyah Br. Mangunsong

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: helfinayaaafattiyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem nilai yang paripurna (syamil wa kamil) tidak hanya mengatur dimensi spiritual kehidupan umatnya, tetapi memberikan perhatian yang sangat serius terhadap dimensi sosial dan ekonomi. Al-Quran secara eksplisit menyerukan agar umat Islam memperhatikan kondisi kaum lemah (dhu'afa), menegakkan keadilan sosial, dan berupaya aktif mengangkat harkat dan martabat seluruh anggota komunitas (QS. Al-Hasyr: 7; QS. Al-Ma'un: 1-7). Seruan normatif yang mulia ini, bagaimanapun, membutuhkan instrumen operasional yang konkret, berbasis bukti, dan sistematis agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pemberdayaan yang efektif dan tepat sasaran.

Di Indonesia, umat Islam yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk merupakan kelompok mayoritas yang paradoksnya masih menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi yang kompleks dan berlapis. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di kantong-kantong wilayah yang penduduknya didominasi oleh Muslim. Ketimpangan distribusi kekayaan, rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terbatasnya kesempatan kerja yang layak, dan lemahnya akses terhadap modal usaha merupakan tantangan struktural yang masih harus dihadapi oleh sebagian besar umat Islam di negeri ini (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. 2024).

Menghadapi realitas tersebut, berbagai upaya pemberdayaan telah dilakukan oleh beragam aktor dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam), lembaga amal zakat, wakaf, infak dan sedekah, hingga komunitas-komunitas lokal. Namun berbagai evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas program-program tersebut masih jauh dari optimal. Satu akar masalah yang paling fundamental adalah ketiadaan basis data yang komprehensif, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sosial ekonomi umat Islam yang dapat dijadikan landasan perumusan strategi yang tepat sasaran

(Mardikanto & Soebiato, 2015). Program pemberdayaan tanpa pemetaan yang memadai ibarat berlayar tanpa kompas bergerak, tetapi tidak tentu arahnya.

Dalam kerangka ini, pemetaan sosial ekonomi hadir sebagai instrumen strategis yang menjembatani antara realitas kondisi umat dengan desain strategi pemberdayaan yang responsif dan kontekstual. Pemetaan sosial ekonomi bukan sekadar kegiatan pengumpulan data statistik, melainkan proses sistematis dan partisipatif yang bertujuan memahami secara mendalam dari perspektif masyarakat sendiri kondisi, kebutuhan, potensi, tantangan, dan aspirasi mereka (Aziz, M. A., & Hidayat, R. 2024). Dalam prosesnya yang partisipatif, pemetaan sekaligus berfungsi sebagai medium komunikasi pembangunan yang membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi aktif.

Perspektif komunikasi pembangunan menambahkan dimensi analitis yang sangat penting dalam kajian ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Cangara (2014), komunikasi bukan sekadar alat penyampaian pesan dalam proses pembangunan, melainkan merupakan elemen konstitutif yang menentukan apakah suatu proses pembangunan bersifat emansipatoris atau justru melanggengkan relasi kekuasaan yang tidak setara. Paradigma komunikasi pembangunan partisipatif yang kini menjadi arus utama dalam disiplin ini memandang komunikasi sebagai proses dialogis horizontal di mana semua pihak memiliki peran dan suara yang setara dalam menentukan arah pembangunan yang mereka inginkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama: (1) Mengapa pemetaan sosial ekonomi umat Islam merupakan instrumen yang krusial dan tidak tergantikan sebagai dasar perumusan strategi pemberdayaan masyarakat? (2) Bagaimana perspektif komunikasi pembangunan dapat mengoptimalkan fungsi pemetaan sosial ekonomi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang transformatif? Menjawab dua pertanyaan tersebut secara mendalam, sistematis, dan komprehensif menjadi tujuan utama artikel ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan program pemberdayaan umat Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan kajian literatur sistematis (systematic literature review/SLR). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan penelitian bersifat analitis-konseptual, yakni mensintesis dan menganalisis secara kritis berbagai temuan penelitian dan pemikiran teoretis yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren tentang hubungan antara pemetaan sosial ekonomi, perspektif komunikasi pembangunan, dan strategi pemberdayaan masyarakat.

Sumber data penelitian ini mencakup buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian lembaga pemerintah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan langsung dengan topik kajian. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui berbagai basis data elektronik, termasuk Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan

Digital), DOAJ (Directory of Open Access Journals), dan repositori nasional Perpustakaan Nasional RI.

Kriteria inklusi yang diterapkan mencakup: (a) relevansi langsung dengan salah satu atau lebih dari tiga tema utama kajian; (b) kualitas akademik yang dapat diverifikasi, diterbitkan oleh penerbit atau jurnal bereputasi; dan (c) ketersediaan dalam bahasa Indonesia. Kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak dapat diakses teksnya secara penuh, literatur yang bersifat opini tanpa dukungan data atau argumen yang memadai, serta literatur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika penelitian ilmiah.

Analisis data dilakukan melalui prosedur tiga-tahap yang diadaptasi dari Miles dan Huberman (dalam Mardikanto & Soebiato, 2015): (1) reduksi data proses seleksi, pemfokusan, dan simplifikasi data mentah dari berbagai sumber menjadi unit-unit informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (2) penyajian data pengorganisasian unit-unit informasi tersebut ke dalam pola-pola tematik yang koheren dan bermakna; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi proses sintesis temuan menjadi proposisi-proposisi teoretis yang menjawab pertanyaan penelitian sekaligus dapat diverifikasi validitasnya. Keabsahan temuan dijamin melalui triangulasi sumber, yakni mengkonfirmasi setiap klaim dengan minimal tiga sumber yang berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Argumentasi Epistemologis: Pengetahuan Berbasis Realitas sebagai Fondasi Tindakan

Sintesis komprehensif kajian literatur menghasilkan lima argumentasi fundamental yang secara kolektif menegaskan urgensi pemetaan sosial ekonomi sebagai basis yang tidak tergantikan dalam perumusan strategi pemberdayaan umat Islam. Argumentasi pertama dan paling mendasar bersifat epistemologis. Setiap strategi pemberdayaan yang bermaksud mengubah kondisi sosial ekonomi suatu komunitas harus didasarkan pada pengetahuan yang akurat, mendalam, dan terkini tentang kondisi yang hendak diubah tersebut. Hikmat (2010) menegaskan bahwa tanpa basis pengetahuan empiris yang solid, strategi pemberdayaan apapun hanya akan menjadi spekulasi yang berpotensi menyia-nyiakan sumber daya yang terbatas. Pemetaan sosial ekonomi menyediakan basis pengetahuan tersebut ia menghasilkan peta realitas yang dapat dijadikan kompas dalam perjalanan pemberdayaan yang panjang dan berliku.

Dalam tradisi keilmuan Islam, prinsip ini juga memiliki landasan yang kuat dan kokoh. Konsep *fiqh al-waqi'* (memahami realitas secara mendalam) merupakan salah satu prasyarat ijtihad yang sah dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Seorang perancang kebijakan atau program yang tidak memahami kondisi nyata (*waqi'*) umat tidak akan mampu menghasilkan solusi yang tepat guna dan berdampak nyata.

Argumentasi kedua bersifat teleologis dan bermakna moral yang mendalam. Dalam konteks pemberdayaan umat, sumber daya yang digunakan baik dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maupun anggaran pemerintah memiliki dimensi amanah yang sangat tinggi. Penggunaan sumber daya ini secara tidak tepat sasaran tidak hanya

merupakan inefisiensi ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran amanah yang memiliki konsekuensi moral dan dalam konteks zakat konsekuensi syariah yang serius (BAZNAS RI, 2023).

Pemetaan sosial ekonomi yang akurat memungkinkan penetapan prioritas yang tepat: siapa yang paling membutuhkan, jenis bantuan apa yang paling relevan, dan intervensi apa yang paling efektif untuk konteks tertentu. Tanpa pemetaan, program pemberdayaan berisiko terjebak dalam fenomena yang dikenal sebagai "elite capture" di mana manfaat program justru dikuasai oleh kelompok yang sudah relatif lebih mampu karena mereka memiliki akses informasi dan jaringan yang lebih baik, sementara yang paling membutuhkan justru tidak terjangkau (Putri, N., & Kurniawan, A., 2022).

Argumentasi ketiga bersifat pragmatis dan berkaitan langsung dengan efisiensi alokasi sumber daya dalam situasi di mana kebutuhan pemberdayaan jauh melampaui ketersediaan sumber daya. Mardikanto dan Soebiato (2015) menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang didukung oleh data pemetaan yang kuat secara konsisten menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan program yang tidak didukung data serupa.

Data pemetaan memungkinkan desain intervensi yang jauh lebih presisi dan tepat sasaran. Sebagai contoh, jika pemetaan menunjukkan bahwa hambatan utama pengembangan usaha mikro di suatu komunitas adalah akses terhadap modal (bukan kurangnya keterampilan teknis), maka sumber daya yang tersedia dapat difokuskan pada pengembangan skema pembiayaan yang aksesibel bukan pada program pelatihan yang mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha.

Argumentasi keempat dan mungkin yang paling orisinal dan paling relevan dengan perspektif komunikasi pembangunan adalah bahwa pemetaan sosial ekonomi yang dilakukan secara partisipatif bukan hanya merupakan prasyarat pemberdayaan, melainkan merupakan bagian integral dari proses pemberdayaan itu sendiri. Priyono dan Pranarka (1996) menjelaskan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan kondisi mereka sendiri, mereka tidak sekadar menjadi sumber informasi, tetapi mengalami proses transformasi kesadaran (*conscientization*) yang sangat berharga.

Proses pemetaan partisipatif memaksa komunitas untuk melakukan refleksi kolektif tentang kondisi mereka, mengidentifikasi akar masalah secara kritis, mengenali potensi yang selama ini tersembunyi, dan membangun visi bersama tentang kondisi yang ingin dicapai. Proses ini dalam bahasa Paulo Freire (dikutip dalam Hikmat, 2010) adalah *conscientization* yang merupakan titik awal dari setiap transformasi sosial yang sejati. Inilah mengapa pemetaan yang baik bukan hanya menghasilkan data, tetapi juga menghasilkan subjek-subjek pembangunan yang lebih sadar, kritis, dan berdaya.

Argumentasi kelima berkaitan dengan keberlanjutan jangka panjang. Kondisi sosial ekonomi bukan sesuatu yang statis; ia berubah seiring perubahan konteks ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dinamika pasar tenaga kerja, dan faktor-faktor kontekstual lainnya. Pemetaan sosial ekonomi yang dilakukan secara berkala dan sistematis memungkinkan program-program pemberdayaan bersifat adaptif secara

responsif menyesuaikan pendekatan dan intervensinya seiring perubahan kondisi yang dipetakan (Anwas, 2014). Tanpa pembaruan data pemetaan yang reguler, program pemberdayaan berisiko menjadi tidak relevan dengan realitas terkini yang dihadapi masyarakat.

Peran Komunikasi Pembangunan dalam Mengoptimalkan Pemetaan Sosial Ekonomi

Perspektif komunikasi pembangunan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengoptimalkan fungsi pemetaan sosial ekonomi sebagai instrumen pemberdayaan. Kajian literatur mengidentifikasi empat peran utama yang saling terkait. Cangara (2014) menegaskan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang dibangun antara fasilitator pemetaan dengan komunitas yang dipetakan. Komunikasi yang efektif bersifat empatik, menghormati kearifan lokal, menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat, dan menciptakan rasa aman untuk berbagi informasi yang sensitif akan menghasilkan data yang jauh lebih kaya, akurat, dan valid.

Dalam konteks pemetaan sosial ekonomi umat Islam, komunikasi yang memanfaatkan nilai-nilai dan simbol-simbol keislaman yang dipahami bersama seperti ukhuwah (persaudaraan), amanah (kepercayaan), dan tanggung jawab bersama terhadap kondisi sesama Muslim dapat menjadi katalis partisipasi yang sangat efektif (Rahman, F., & Syahputra, D., 2023). Nurudin (2017) mencatat bahwa pemetaan yang dilakukan melalui atau dengan dukungan aktif tokoh-tokoh agama yang dipercaya oleh komunitas cenderung menghasilkan tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi dan data yang lebih jujur.

Data pemetaan yang akurat namun tidak dikomunikasikan secara efektif kepada pemangku kepentingan yang relevan tidak akan menghasilkan dampak kebijakan yang diharapkan. Rohim (2016) menekankan pentingnya mendesain strategi komunikasi yang berbeda untuk audiens yang berbeda: data yang dikomunikasikan kepada komunitas itu sendiri harus menggunakan format yang mudah dipahami dan membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*); data untuk pembuat kebijakan harus disajikan secara ringkas, berbasis bukti, dan dilengkapi rekomendasi yang actionable; sementara data untuk lembaga filantropi Islam harus menggambarkan potret yang autentik dan menyentuh tentang kondisi nyata umat.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi program pemberdayaan adalah fragmentasi dan tumpang-tindih di antara berbagai lembaga dan inisiatif yang beroperasi secara terpisah-pisah tanpa koordinasi yang memadai (Mardikanto & Soebiato, 2015). Data pemetaan yang komprehensif dan dikomunikasikan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan dapat menjadi *common ground* yang memfasilitasi koordinasi, sinergi, dan pembagian peran yang lebih efisien di antara berbagai lembaga pemberdayaan umat Islam.

Cangara (2014) menegaskan bahwa program pemberdayaan yang efektif harus memiliki mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat penerima

manfaat secara rutin memberikan umpan balik tentang relevansi, kualitas, dan dampak program. Mekanisme umpan balik ini yang pada hakikatnya adalah sistem komunikasi yang didesain dengan baik memungkinkan deteksi dini terhadap masalah implementasi, koreksi yang cepat, dan pembelajaran institusional yang berkelanjutan. Tanpa mekanisme ini, program pemberdayaan cenderung menjadi rigid dan tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan di lapangan.

Model Integrasi Pemetaan Komunikasi Pemberdayaan (I-PKP), Tantangan Implementasi, Serta Strategi Mengatasinya.

Berdasarkan sintesis komprehensif dari kajian literatur, penelitian ini mengajukan sebuah model konseptual yang disebut Model Integrasi Pemetaan-Komunikasi-Pemberdayaan (I-PKP). Model ini menggambarkan bagaimana pemetaan sosial ekonomi, komunikasi pembangunan, dan strategi pemberdayaan saling berintegrasi dalam sebuah sistem yang koheren, dinamis, dan siklika. Model ini diajukan sebagai kontribusi konseptual orisinal yang melengkapi dan memperluas model-model pemberdayaan yang sudah ada.

Model I-PKP terdiri dari empat fase yang saling terhubung secara siklikal dan tidak linear, mencerminkan kompleksitas dan dinamisme proses pemberdayaan yang sesungguhnya. Pengumpulan data sosial ekonomi multidimensi yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai ko-peneliti, bukan objek penelitian. Pada fase ini, prinsip-prinsip komunikasi partisipatif diterapkan secara konsisten untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, komprehensif, dan mencerminkan perspektif dan pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Instrumen yang digunakan mencakup FGD, wawancara mendalam, participatory rural appraisal (PRA), dan pemetaan visual partisipatif.

Pengolahan, interpretasi, dan komunikasi data pemetaan kepada berbagai pemangku kepentingan dengan format dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing audiens. Pada fase ini, data mentah diubah menjadi "narasi pemberdayaan" yang dapat mendorong aksi kolektif dan menginspirasi komitmen dari berbagai pihak. Analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga diagnostik dan prospektif.

Perumusan strategi pemberdayaan yang secara langsung merespons temuan pemetaan, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam desain program secara organik. Desain strategi mencakup penetapan prioritas intervensi, pemilihan modalitas program yang paling sesuai dengan konteks, penentuan mitra dan saluran implementasi, serta perancangan sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif.

Pelaksanaan program pemberdayaan disertai mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis komunikasi dua arah yang memungkinkan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan. Temuan evaluasi digunakan untuk memperbarui data pemetaan secara berkala, sehingga siklus terus berlanjut secara adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan yang selalu berubah.

Keunikan Model I-PKP dibandingkan model-model pemberdayaan yang ada terletak pada tiga hal: pertama, penekanannya bahwa komunikasi bukan sekadar alat dalam setiap fase, melainkan prinsip transversal yang meresapi dan menentukan kualitas seluruh proses; kedua, sifat siklikal (bukan linear) yang mengakui bahwa pemberdayaan sejati adalah proses tanpa akhir yang terus beradaptasi; dan ketiga, integrasi nilai-nilai keislaman sebagai landasan normatif yang memberi makna dan arah bagi seluruh proses pemberdayaan.

Tantangan Implementasi dan Strategi Mengatasinya.

Kajian literatur juga mengidentifikasi berbagai tantangan konkret yang perlu diantisipasi dalam implementasi pemetaan sosial ekonomi berbasis komunikasi pembangunan untuk umat Islam. Sebagian besar lembaga-lembaga Islam belum memiliki kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pemetaan yang sistematis dan berkualitas. Solusinya mencakup pengembangan panduan pemetaan yang sederhana, kemitraan dengan perguruan tinggi, dan pengembangan sistem pemetaan berbasis teknologi yang user-friendly (Anwas, 2014).

Masyarakat seringkali memiliki kekhawatiran yang legitimate tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Membangun kepercayaan melalui transparansi, keterlibatan tokoh yang dipercaya, dan memberikan bukti nyata bahwa data benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat merupakan kunci mengatasi tantangan ini (Hikmat, 2010).

Fragmentasi di antara berbagai lembaga pemetaan menyebabkan tumpang-tindih yang memboroskan sumber daya. Pengembangan sistem data terpadu yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan namun dilindungi secara memadai merupakan solusi yang diperlukan dalam jangka menengah.

Pemetaan berkualitas membutuhkan investasi finansial yang tidak kecil. Solusi kreatif mencakup integrasi anggaran pemetaan ke dalam biaya operasional program yang sudah ada, pembentukan konsorsium berbagi biaya, serta advokasi agar pemetaan dapat dibiayai dari dana ZIS sebagai bagian dari program pemberdayaan mustahiq (Mardikanto & Soebiato, 2015).

Mengumpulkan data pemetaan yang baik hanya bernilai jika data tersebut benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan. Membangun budaya berbasis data (data-driven culture) di lembaga-lembaga pemberdayaan umat Islam merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan komitmen dari pimpinan dan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan dan menghasilkan beberapa simpulan penting yang memiliki implikasi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Pertama, pemetaan sosial ekonomi umat Islam merupakan fondasi epistemologis, moral, dan pragmatis yang tidak tergantikan bagi perumusan strategi pemberdayaan yang efektif. Lima argumentasi fundamental

epistemologis, teleologis, pragmatis, partisipatif, dan keberlanjutan secara kolektif dan saling menguatkan menegaskan bahwa mengabaikan pemetaan sosial ekonomi berarti membangun program pemberdayaan di atas fondasi yang rapuh, spekulatif, dan rentan terhadap kegagalan.

Kedua, perspektif komunikasi pembangunan partisipatif mengoptimalkan fungsi pemetaan sosial ekonomi melalui empat peran kunci yang saling terkait: sebagai fasilitator kualitas partisipasi, medium diseminasi dan kontekstualisasi data, kerangka pembangunan konsensus kelembagaan, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan evaluasi dan adaptasi berkelanjutan. Integrasi prinsip-prinsip komunikasi pembangunan ke dalam seluruh fase pemetaan adalah prasyarat untuk mengubahnya dari sekadar kegiatan administratif menjadi instrumen pemberdayaan yang benar-benar transformatif.

Ketiga, Model Integrasi Pemetaan-Komunikasi-Pemberdayaan (I-PKP) yang diajukan dalam penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang koheren, operasional, dan kontekstual bagi berbagai pemangku kepentingan mulai dari lembaga zakat dan ormas Islam, pemerintah daerah, hingga akademisi untuk mendesain dan mengimplementasikan program pemberdayaan umat Islam yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual-teoretis, sehingga belum menghasilkan bukti empiris tentang efektivitas Model I-PKP dalam konteks implementasi nyata. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini secara empiris melalui studi kasus di berbagai konteks lokal, mengembangkan instrumen pengukuran yang valid, dan mengeksplorasi adaptasi model untuk konteks komunitas Muslim yang beragam di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, M. A., & Hidayat, R. (2024). Pemberdayaan masyarakat berbasis pemetaan sosial dalam pembangunan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 145–158.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: BPS RI.
- BAZNAS RI. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Bungin, B. (2011). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat (Edisi ke-5)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cangara, H. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (Cetakan ke-22)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Author: Riswan Rambe (UPU), Helfinaya Fattiyah Br. Mangunsong, Intan Safitri, Al Dira Hairani, Tasya Maulidya Hutagalung, Nadia Syahmanda, Intan Khusnul Khotimah

- Hikmat, H. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi). Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. (2020). Pedoman Pemetaan Sosial Desa. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. (2024). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2024*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Panduan Pemetaan Sosial dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Kemensos RI.
- Liliweri, A. (2011). Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurudin. (2017). Pengantar Komunikasi Massa (Edisi ke-8). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (Eds.). (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2020). Laporan Penelitian: Kondisi Sosial Ekonomi Umat Islam Indonesia. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.
- Putri, N., & Kurniawan, A. (2022). Pemetaan sosial sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 55–69.
- Rahman, F., & Syahputra, D. (2023). Komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(2), 180–195.
- Rohim, S. (2016). Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam dan Aplikasi (Edisi ke-2). Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Edisi ke-4). Bandung: PT Refika Aditama.
- Suryanto. (2015). Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wiryanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Grasindo.
- Yusuf, M. (2017). Pemetaan Sosial Berbasis Komunitas sebagai Instrumen Pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 14–28.